

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis. Hal ini terutama karena sektor pertanian masih memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk yang ada di pedesaan dan menyediakan bahan pangan bagi penduduk. Peranan lain dari sektor pertanian adalah menyediakan bahan mentah bagi industri dan menghasilkan devisa negara melalui ekspor non-migas. Bahkan sektor pertanian mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini.

Indonesia sebagai salah satu negara agraris, pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pembangunan di bidang pertanian. Oleh karenanya pembangunan yang dilakukan pada sektor pertanian perlu terus didorong untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini, sektor pertanian tetap merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional. Di negara Indonesia padi merupakan bahan makanan pokok bagi penduduk serta merupakan hasil pertanian utama. Masalah pangan pada saat sekarang dan saat yang akan datang masih menjadi perhatian dari pemerintah.

Adanya kenyataan permintaan akan pangan terutama beras terus meningkat akibat pertambahan penduduk sehingga ketersediaan pangan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat merupakan kewajiban pemerintah yang tidak bisa ditawar lagi. Laju

pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, yaitu dari 1,40% per tahun pada periode 1990-2000 menjadi 1,49% per tahun pada periode 2000-2010. Ini mengindikasikan kegagalan serius pemerintah di dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Implikasinya adalah bahwa kebutuhan pangan ke depan akan meningkat lebih cepat (Sumber : RPJMN bidang pangan dan pertanian, 2015-2019).

Ketersediaan produksi pertanian belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar domestik. Akibat kondisi tersebut, memaksa pemerintah Indonesia hampir setiap tahunnya untuk selalu melakukan impor produk pertanian dari negara lain. Berdasarkan hasil dari Sensus Pertanian tahun 2013, nilai impor produk pertanian meningkat empat kali lipat menjadi 14,90 miliar dollar AS dari 3,34 miliar dollar AS selama satu dekade terakhir. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dengan penduduknya yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian belum mampu menghasilkan produksi untuk mencukupi kebutuhan domestik.

Banyak hal yang harus dipikirkan dan dilakukan untuk kemajuan dan perkembangan dalam sistem pertanian pada masa yang akan datang. Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan utama yang harus dicapai dan menjadi prioritas dalam membuat dan melaksanakan program apapun. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan terutama pada masyarakat petani perlu diadakan pembangunan pada sektor pertanian, dimana pembangunan ini merupakan penciptaan sistem dan tata nilai yang lebih baik dalam menjelaskan program yang tidak hanya menguntungkan satu golongan

namun diarahkan untuk mencapai pondasi yang kuat pada pengembangan nasional sehingga terjadi keadilan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Menurut Cris Manning pengembangan dalam sektor pertanian harus mengantisipasi tantangan demokratisasi dan globalisasi untuk dapat menciptakan sistem yang adil. Selain itu harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera khususnya petani melalui pembangunan sistem pertanian yang mapan. Sistem tersebut harus berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistik (Cris Manning, 1998).

- 1) *Berdaya Saing*, berarti pertanian kita dapat disejajarkan dengan produk pertanian negara lain baik jumlah maupun kualitasnya.
- 2) *Berkerakyatan*, berarti bahwa setiap usaha pembangunan pertanian harus mengikutsertakan petani supaya semakin berdaya sebagai subyek pembangunan.
- 3) *Berkelanjutan*, berarti bahwa pembangunan pertanian harus memberikan jaminan bagi keberlangsungan sektor pertanian.
- 4) *Desentralistik*, berarti bahwa pembangunan pertanian harus berdasarkan keinginan petani, sesuai dengan kebutuhannya dan sangat menghargai budaya lokal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen) atau meningkat 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 tercatat 28,07 juta orang (11,37 persen). Perinciannya, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,30 juta orang dari 10,33 juta orang pada Maret 2013 menjadi 10,63 juta orang pada September 2013. Sementara,

di daerah pedesaan naik sebanyak 0,18 juta orang (17,74 juta orang pada Maret 2013 menjadi 17,92 juta orang pada September 2013). Selama periode Maret-September 2013, prosentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2013 sebesar 8,39 persen atau naik menjadi 8,52 persen pada September 2013. Sementara, prosentase penduduk miskin di daerah pedesaan meningkat dari 14,32 persen pada Maret 2013 menjadi 14,42 persen pada September 2013 (Sumber : *republika.co.id*, 2014).

Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kemiskinan yang terjadi di pedesaan dipicu oleh semakin terbatasnya kesempatan kerja yang ada di pedesaan. Menurut Sumodiningrat, kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang atau lingkungannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor di luar jangkauan individu yang menghambat seseorang untuk meraih kesempatan. Artinya, bukan karena seseorang tidak mau bekerja tapi struktur yang ada yang menjadi hambatan. Sebagian besar tenaga kerja yang ada di pedesaan mengandalkan sektor pertanian (Sumodiningrat,dkk.1999).

Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena

dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan. Berbagai strategi dalam pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Tapi masih saja formulasi untuk pengentasan kemiskinan tersebut belum mampu sepenuhnya menyelesaikan persoalan mengenai kemiskinan itu sendiri (Marwotohadi, 2005 : 108). Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencakup tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu

Pada umumnya masalah kemiskinan sangat erat hubungannya dengan pertanian. Seperti pada penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, permasalahan ini terjadi dikarenakan para petani pada umumnya berusaha dengan skala kecil yakni rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 Ha dan bahkan sebagian dari petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani (Petani Penggarap), bahkan juga buruh tani. Selain itu juga disebabkan oleh petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani dan akses pasar. Petani juga masih dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi sekaligus memberdayakan petani.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan ruang kepada daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh tiap daerah. Potensi tersebut (potensi pertanian) harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi dasar negara. Pengelolaan potensi daerah dan sumberdaya pertanian perlu dilakukan karena sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Pendayagunaan potensi daerah yang maju, dinamis, serasi dan bertanggung jawab akan mempercepat pengembangan pembangunan di daerah dan tentunya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di wilayah pedesaan.

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun yang ada di daerah wajib melakukan pemberdayaan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat petani pedesaan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan yang lebih baik lagi. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani pasal 3 huruf a yakni “Pemberdayaan Petani bertujuan mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik”. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menumbuhkan dan menguatkan setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat (dalam penelitian ini yang dimaksud adalah masyarakat petani pedesaan) agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal serta mampu menekan angka kemiskinan di pedesaan.

Banyak sekali model pemberdayaan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun BUMN namun hasil yang ada belum sesuai yang diharapkan. Sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, partisipasi masyarakat serta pemahaman yang komprehensif pada masyarakat yang akan diberdayakan adalah sebuah keharusan (Djamhuri, 2008; Xu, et al, 2010). Dengan adanya sinergi ini maka diharapkan ada kegiatan yang saling mengisi satu sama lain guna mencapai keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satu metode pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah dengan melaksanakan program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi. Program pemerintah melalui Kementerian Pertanian berupa SL-PTT ini bertujuan mempercepat alih teknologi dengan menggunakan laboratorium lapang sebesar 1 ha sebagai tempat belajar petani yang bertujuan memberi dampak pada peningkatan produksi padi non hibrida. Peningkatan produksi ini nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Kabupaten Sleman secara administratif terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan salah satu kabupaten penghasil bahan pangan (lambung padi) di DIY. Namun dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir ini di Kabupaten Sleman telah banyak terjadi alih fungsi lahan dari lahan sawah yang digunakan untuk kegiatan pertanian ke non-pertanian seperti pendirian perumahan, toko-toko, serta bangunan lainnya. Hal tersebut menyebabkan lahan sawah untuk kegiatan pertanian yang ada semakin sempit sehingga dapat berpengaruh terhadap luas panen pada sektor pertanian di Kabupaten Sleman.

Tabel 1.1. Luas Panen Padi Tahun 2009-2013 Di Kabupaten Sleman

No	Uraian	Luas Panen (Ha)					Pertumbuhan (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Padi Sawah	44.037	44.398	40.641	45.832	48.584	2,78
2.	Padi Ladang	437	440	439	467	499	3,42
Total		44.474	44.838	41.080	46.299	49.083	2,79

Sumber : Data diambil dari BPS DIY, 2014.

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata pertumbuhan luas panen padi di Kabupaten Sleman dalam 5 tahun terakhir kurang dari 5%. Pertumbuhan luas panen di Kabupaten Sleman tahun 2009-2013 hanya mencapai 2,79% dengan rata-rata pertumbuhan luas panen untuk padi sawah sebesar 2,78% dan padi ladang sebesar 3,42%. Dengan pertumbuhan luas panen yang kurang begitu signifikan tentu hal ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat produksi padi di Kabupaten Sleman.

Dilihat dari luas panen yang terjadi, Kabupaten Sleman sesungguhnya memiliki potensi pertanian yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi skala kegiatan usaha yang sedang atau besar khususnya bagi masyarakat di pedesaan. Namun pada kenyataannya, hasil dari pertanian ini belum berdampak signifikan terhadap kehidupan petani di wilayah pedesaan. Hasil pertanian yang fluktuatif setiap tahunnya dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya masih rendahnya pengetahuan petani akan pola tananam yang benar, iklim yang sulit untuk diperkirakan seperti sekarang ini, harga pupuk yang tinggi serta faktor hama merupakan beberapa faktor penyebab produksi pertanian naik-turun setiap tahunnya. Untuk produksi pertanian di Kabupaten Sleman tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2. Produksi Padi Tahun 2009-2013 Di Kabupaten Sleman

No	Uraian	Produksi (Ton)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Padi Sawah	268.075	264.317	231.374	311.378	305.913	4,74
2.	Padi Ladang	1.329	1.756	1.339	1.437	1.668	7,94
Total		269.404	266.073	232.713	312.815	301.581	4,74

Sumber: Data diambil dari BPS DIY, 2014.

Dari tabel 1.2 diatas, dapat dilihat untuk rata-rata pertumbuhan produksi padi di Kabupaten Sleman masih berada pada kisaran angka kurang dari 5%. Pertumbuhan padi di Kabupaten Sleman selama tahun 2009-2013 adalah sebesar 4,74% dimana untuk padi sawah mengalami pertumbuhan produksi sebesar 4,74% dan padi ladang sebesar 7,94%. Pertumbuhan padi di Kabupaten Sleman yang kurang dari 5% juga tidak terlepas dari pengaruh pertumbuhan luas panen padi di wilayah Sleman yang masih fluktuatif.

Di Kabupaten Sleman, salah satu daerah yang dikembangkan untuk pertanian adalah di Kecamatan Moyudan. Secara administrasi wilayah Kecamatan Moyudan terdiri atas 4 desa yakni Desa Sumberagung, Desa Sumpersari, Desa Sumberahayu dan Desa Sumberarum. Secara geografis letaknya berada di wilayah Sleman Barat yang masih merupakan daerah pedesaan sehingga sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian khususnya pertanian padi.

Potensi pertanian yang ada di Desa Sumberagung memiliki prospek yang cukup baik untuk dijadikan sebagai penghasil produksi beras. Hal tersebut cukup menjanjikan apabila masyarakat desa sepenuhnya dapat menyadari

bahwa bidang pertanian dapat dijadikan sebagai aset yang menjanjikan bagi masa depan mereka. Namun masih ada beberapa permasalahan dalam proses pengembangan pada sektor pertanian di wilayah Desa Sumberagung. *Pertama*, adalah masalah hama yakni hama tikus yang menyebabkan pertanian di wilayah ini produksinya menjadi tidak maksimal bahkan gagal panen. Hal ini terlihat dari Luas panen padi di wilayah Sumberagung selama dua tahun berturut-turut yakni tahun 2011 dan tahun 2012 seperti yang ada pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Luas Panen Padi Tahun 2011-2012 Desa Sumberagung

No	Tahun	Luas Tanam	Luas Panen	Keterangan
1.	2011	1.164 Ha	-	Puso
2.	2012	936 Ha	14 Ha	Tikus

Sumber : BPP Kecamatan Moyudan, 2011-2012.

Dari tabel tersebut dapat diketahui di Desa Sumberagung pada tahun 2011 mengalami kegagalan panen dikarenakan padi terkena puso. Kemudian pada tahun 2012 di wilayah ini juga hasil panen tidak begitu maksimal karena hama tikus. Terlihat dari luas panen yang hanya mencapai 14 Ha dari keseluruhan luas tanam 936 Ha atau prosentasenya hanya 1,49%.

Kedua, tingkat keasaman atau pH tanah pertanian di Desa Sumberagung yang mencapai angka 5 - 6,5 menunjukkan sifat tanah di wilayah tersebut adalah asam. Hal ini disebabkan karena penggunaan pupuk kimia oleh petani yang masif. Kondisi tanah yang asam ini akan berdampak pada penyerapan unsur hara tanah menjadi tidak maksimal sehingga berpengaruh terhadap kualitas maupun kuantitas hasil pertanian.

Ketiga, kurangnya akses pada modal sehingga dapat mempengaruhi animo masyarakat dalam berusaha khususnya dalam mengembangkan usaha pertanian. Keterbatasan modal pertanian yang masih dirasakan oleh petani di wilayah Sumberagung ditunjukkan dengan masih banyaknya bantuan (subsidi) pemerintah baik pupuk maupun benih yang diberikan kepada petani.

Tabel 1.4. Bantuan Benih Bersubsidi Tahun 2012-2013

Desa Sumberagung

No	Tahun	Jumlah (Ton)
1	2012	10,72
2	2013	11

Sumber : BPP Kecamatan Moyudan, 2012-2013.

Melihat dari tabel 1.4 jumlah bantuan benih bersubsidi kepada petani Desa Sumberagung untuk tahun 2012 sebanyak 10,72 Ton, meningkat menjadi 11 Ton pada tahun 2013. Peningkatan jumlah bantuan benih tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meringankan kebutuhan petani dengan harapan dapat mendorong petani di Sumberagung untuk lebih termotivasi lagi dalam mengembangkan kegiatan bertani. Berbagai permasalahan diatas dianggap cukup mempengaruhi pengembangan bidang pertanian di wilayah tersebut sehingga masyarakatnya khususnya petani perlu untuk diberdayakan.

Usaha pemberdayaan masyarakat pedesaan menjadi agenda penting dalam konstelasi pembangunan perekonomian di wilayah pedesaan. Peran masyarakat pedesaan sangat strategis, oleh karena itu sebuah pemberdayaan mempunyai nilai urgensi dalam pertumbuhan perekonomian pedesaan, peningkatan produktivitas pertanian, pengolahan hasil pertanian maupun pengelolaan potensi pertanian yang ada di wilayah pedesaan. Di samping itu

pemberdayaan juga memiliki nilai penting untuk meningkatkan kualitas masyarakat pedesaan khususnya petani dalam pengembangan komoditas di sektor pertanian dan sektor lain yang saling menunjang.

Dalam penelitian ini dimaksudkan ingin mengetahui evaluasi pelaksanaan program SL-PTT terkait dengan usaha pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan. Selain itu juga ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan program SL-PTT ini. Selanjutnya setelah diketahui apa yang menjadi kelemahan atau kendala dari program SL-PTT tersebut maka dapat dijadikan sebagai landasan untuk memberikan rekomendasi terhadap perbaikan program ini selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut maka evaluasi perlu dilakukan karena sangat penting untuk menilai pelaksanaan suatu program.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah evaluasi Program SL-PTT dalam usaha pemberdayaan masyarakat pedesaan di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan?
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan Program SL-PTT dalam usaha pemberdayaan masyarakat pedesaan di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui evaluasi Program SL-PTT dalam usaha pemberdayaan masyarakat pedesaan di Desa Sumberagung Moyudan Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program SL-PTT dalam usaha pemberdayaan masyarakat pedesaan di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, untuk memperkaya kajian ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Pemerintahan yang terkait dengan evaluasi program pemerintah.
2. Secara teoritis, untuk melatih dan mengembangkan diri serta meningkatkan pemahaman berpikir melalui penulisan ilmiah dengan menerapkan teori dan pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Sleman.

E. Kerangka Teori

Kerangka dasar teori adalah berisikan uraian-uraian yang menjelaskan mengenai variabel-variabel dan hubungan yang terjalin antar variabel dengan berdasarkan pada konsep definisi tertentu. Teori merupakan unsur penelitian yang memiliki peranan paling besar dalam penelitian yang akan dilakukan. Teori memiliki peranan terbesar dalam suatu penelitian yang akan dilakukan karena teori menerangkan suatu fenomena yang menjadi fokus penelitian dan digunakan untuk menyusun konsep serta fakta dalam suatu pola yang logis untuk hasil penelitian.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka dalam Evaluasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Dalam Usaha

Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Di Kabupaten Sleman akan dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi

Secara umum evaluasi dapat diartikan suatu proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Sesuatu tersebut dapat berupa orang, benda, kegiatan, keadaan atau suatu kesatuan/kelompok tertentu seperti program/proyek. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa proses evaluasi selalu mengandung *judgement* (penilaian/penentuan) yang didasarkan oleh kriteria tertentu. Kriteria ini dapat ditentukan oleh evaluator sendiri, pemberi tugas maupun dari pedoman evaluasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan tersebut dengan para konstituen.

Aji, dkk (1984) mengemukakan bahwa evaluasi adalah salah satu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur seobyektif mungkin hasil-hasil yang mendukung maupun yang tidak mendukung suatu rencana. Oleh karena itu keberhasilan rencana program dan kegiatan hanya dapat dibuktikan dengan evaluasi.

Sesuai dengan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan, pengertian evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standard. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2004) evaluasi adalah kegiatan pengukuran yang berlandaskan pada hasil monitoring yang dilakukan secara periodik. Bryan dan White (1987) menyatakan bahwa evaluasi program merupakan suatu upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi.

Evaluasi merupakan suatu tahap akhir dari sebuah siklus kebijakan yang terjadi setelah tahap formulasi dan implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna mempertanggung jawabkan kebijakan tersebut dengan para konstituen. Sejauh mana *tujuan* dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”. Evaluasi diperlukan sebagai upaya untuk mengetahui pelaksanaan suatu program yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan suatu program dan pada akhirnya evaluasi kemudian diharapkan akan terjadi perbaikan-perbaikan pelaksanaan suatu kebijakan yang lebih sempurna di masa mendatang.

Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam kegiatan analisis suatu kebijakan/program. *Pertama*, dan yang paling penting evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan/program yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi

dimaksudkan untuk mengukur tujuan-tujuan maupun target-target dari sebuah kebijakan/program yang telah dicapai. *Kedua*, evaluasi memberi sumbangan pada *klarifikasi* dan *kritik* terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Kritik terhadap nilai kebijakan/program dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. *Ketiga*, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk *perumusan masalah* dan *rekomendasi*. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberikan perumusan ulang masalah kebijakan, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat memberikan alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Dunn, 1998 : 609-611).

Mengikuti Samodra Wibawa dkk (1993) (dalam Riant Nugroho, 2003 : 186-187), mengatakan bahwa evaluasi mempunyai 4 fungsi yaitu :

1. *Ekplanasi*. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat generalisasi pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. *Kepatuhan*. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. *Audit*. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. *Akunting*. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Dunn (1998) evaluasi dapat dilakukan sebelum kebijaksanaan (evaluasi sumatif) maupun sesudah kebijaksanaan dilaksanakan (evaluasi formatif). Atau dengan kata lain, evaluasi sumatif merupakan penilaian dampak dari suatu program atau biasa disebut dengan evaluasi dampak (outcome evaluasi) dan evaluasi formatif, merupakan proses penilaian terhadap proses dari program disebut juga dengan evaluasi proses. Dunn (1998) menyatakan pada umumnya ada tiga cara untuk melaksanakan evaluasi, yakni :

- 1) Membandingkan fakta atau keadaan yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian dengan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu program.
- 2) Membandingkan berbagai hasil program dalam kaitannya dengan input yang digunakan, misalnya kemajuan suatu daerah yang telah melaksanakan suatu program pembangunan daerah dengan kemajuan daerah lain yang belum melaksanakan program sejenis.
- 3) Membandingkan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu di tempat yang sama sebagai hasil pelaksanaan suatu program tertentu.

Sedangkan evaluasi (dalam Riant Nugroho, 2003 : 51) memiliki beberapa tujuan yakni sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah di implementasikan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan dapat mengetahui seberapa besar biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat outcome suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan.
- e. Evaluasi program untuk mengetahui apakah ada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Evaluasi sebagai input bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik (feed back).

2. Evaluasi Program

Menurut John M.Echols dan Hasan Shadily program adalah rencana yang cenderung menjelaskan mengenai apa-apa yang akan dilaksanakan (John M.Echols dan Hasan Shadily, 2000). Program adalah suatu pendekatan untuk melaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh aktor-aktor penanggung jawab dan dilengkapi dengan standar operation prosedur serta waktu pelaksanaannya. Program merupakan tahapan yang menghubungkan antara rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan, program merupakan proses penerjemahan pernyataan kebijakan ke dalam aksi kebijakan. Program merupakan bagian dari sebuah kebijakan.

Sedangkan pengertian program menurut John L Herman (dalam Tayibnapis, 1989 : 6) adalah segala sesuatu yang anda lakukan dengan harapan akan mendatangkan hasil atau manfaat. Dari pengertian ini dapat

ditarik benang merah bahwa semua perbuatan manusia yang darinya diharapkan akan memperoleh hasil dan manfaat dapat disebut program. Pengertian program yang lain adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah atau lembaga (Perda Provinsi Banten No.1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Provinsi Banten).

Dalam melakukan evaluasi program, diperlukan orang-orang yang memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk dapat menjadi evaluator program seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Suharsimi Arikunto, 2004 : 9) :

1. *Mampu melaksanakan*, persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh evaluator adalah bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi yang didukung oleh teori dan keterampilan praktik.
2. *Cermat*, dapat melihat celah-celah dan detail dari program serta bagian program yang akan dievaluasi.
3. *Objektif*, tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadi, agar dapat mengumpulkan data sesuai dengan keadaannya, selanjutnya dapat mengambil kesimpulan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang harus diikuti.
4. *Sabar dan tekun*, agar di dalam melaksanakan tugas dimulai dari membuat rancangan kegiatan dalam bentuk penyusunan proposal,

menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan menyusun laporan, tidak gegabah dan tergesa-gesa.

5. *Hati-hati dan bertanggung jawab*, yaitu melakukan pekerjaan evaluasi dengan penuh pertimbangan, namun apabila masih ada kekeliruan yang diperbuat, berani menanggung risiko atas segala kesalahannya.

2.1 Definisi Evaluasi Program

Ada tiga istilah yang digunakan dan perlu disepakati sebelum disampaikan uraian lebih jauh tentang evaluasi program yaitu “evaluasi” (*evaluation*), “pengukuran” (*measurement*), dan “penilaian” (*assessment*) (Suharsimi Arikunto, 2004 : 1). Definisi program jika dikaitkan dengan evaluasi program maka dapat diartikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga pengertian penting yang perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu (1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, (2) terjadi dalam waktu relatif lama-bukan kegiatan tunggal tapi jamak-berkesinambungan, dan (3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Suharsimi Arikunto, 2004 : 3).

Definisi dari evaluasi program menurut ahli (Roswati, 2008 : 66) yakni Evaluasi Program adalah suatu kegiatan yang menentukan sampai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai (Tyler, 1950). Pengertian lainnya, Evaluasi Program adalah suatu kegiatan yang merinci apakah ada selisih/kesenjangan antara apa yang direncanakan

dengan suatu standar yang ada (Alkin, 1969 & Provous, 1971). Setiap program yang akan dilaksanakan harus memiliki indikator/standar pengukuran. Hal ini penting karena akan menjadi tolak ukur dalam evaluasi untuk menentukan apakah program tersebut berhasil atau gagal, bermanfaat atau tidak bagi masyarakat sasaran.

2.2 Fungsi Evaluasi Program

Menurut Roswati (2008 : 67), Evaluasi Program memiliki 2 fungsi yakni Evaluasi Formatif dan Evaluasi Sumatif.

1. Evaluasi Formatif

Evaluasi ini berfungsi untuk memperbaiki atau mengembangkan program yang sedang berlangsung. Dengan evaluasi formatif ini diharapkan program tetap berjalan seperti yang telah direncanakan sehingga terjamin mencapai tujuan.

2. Evaluasi Sumatif

Evaluasi ini dilakukan pada akhir program dan memiliki fungsi untuk mengetahui sejauhmana program itu mencapai tujuannya. Dengan demikian hasil dari evaluasi sumatif ini dapat dipergunakan untuk sertifikasi, seleksi, tindak lanjut dan pengambilan keputusan langkah-langkah berikutnya. Secara psikologis/sosial-praktis evaluasi sumatif berfungsi untuk meningkatkan kesadaran tentang kekhususan suatu kegiatan, memotivasi evaluator dan meningkatkan hubungan inter-relasi.

2.3 Pendekatan Dalam Evaluasi Pogram

Sebelum evaluasi dilaksanakan perlu adanya pendekatan-pendekatan tertentu. Pendekatan yang biasanya sering digunakan dalam pelaksanaan evaluasi program yakni sebagai berikut (Roswati, 2008 : 68-69) :

1. Pendekatan *Pre-ordinate*

Kriteria ditetapkan sebelum evaluator pergi ke lapangan. Kriteria dikembangkan dari teori atau ukuran baku tertentu, contoh *Cost Benefit and Cost Effectiveness*. Dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwasannya pendekatan ini memiliki 2 karakteristik : *pertama*, kriteria evaluasi ditetapkan sebelum pelaksanaan evaluasi dilakukan; *kedua*, kriteria evaluasi dikembangkan dan bersumber pada standar tertentu seperti pada pandangan teoritik.

2. Pendekatan *Fidelity*

Kriteria ditetapkan sebelum ke lapangan, dikembangkan dan dianalisis dari objek yang akan dinilai. Jadi, sebelum ke lapangan evaluator harus mempelajari seluk beluk objek tersebut secara menyeluruh atau melakukan wawancara kepada pengembang program. Pendekatan ini memiliki persamaan kriteria dengan pedekatan *pre-ordinate* yakni kriteria yang dikembangkan sebelum evaluator turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Perbedaan prinsipel keduanya yakni terletak pada hakekat evaluasi yang digunakan. Pendekatan *Fidelity* tidak menggunakan kriteria yang

bersifat umum (universal) sebagaimana tuntutan pendekatan *pre-ordinate*.

3. Pendekatan Gabungan

Kriteria dikembangkan dengan menggunakan gabungan cara pada butir 1 dan 2 seperti yang telah diuraikan diatas. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara pendekatan *pre-ordinate*, *fidelity*, dan *process*. Kriteria yang digunakan dikembangkan dari karakteristik program dari luar, seperti berdasarkan pandangan secara teori, dari para pelaksana (aktor), dan dari pemakai program.

4. Pendekatan Proses

Kriteria dikembangkan selama evaluator berada di lapangan (pendekatan naturalistik). Sesuai dengan namanya, pendekatan ini mengembangkan kriteria selama proses evaluasi berlangsung. Kriteria didapat melalui wawancara, observasi atau studi dokumentasi. Pendekatan ini berhubungan erat dengan aplikasi pendekatan kualitatif. Karakteristik yang menonjol dari pendekatan ini merupakan kriteria yang dipergunakan dikembangkan selama evaluator di lapangan. Konsekuensinya pendekatan ini terikat dengan masalah yang dihadapi oleh para pelaksana program di lapangan.

2.4 Kriteria Evaluasi Program

Untuk melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program maka perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria yang akan digunakan sebelum evaluasi dilakukan. Adapun beberapa kriteria untuk melakukan

evaluasi program menurut William Dunn (1998 : 610) adalah sebagai berikut:

1. *Efektivitas*. Pertanyaan yang digunakan dalam kriteria ini adalah apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2. *Efisiensi*. Pertanyaan yang digunakan dalam kriteria ini adalah seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3. *Kecukupan*. Pertanyaan yang digunakan dalam kriteria ini adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4. *Pemerataan*. Pertanyaan yang digunakan dalam kriteria ini adalah apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5. *Responsivitas*. Pertanyaan yang digunakan dalam kriteria ini adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, resperensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6. *Ketepatan*. Pertanyaan yang digunakan dalam kriteria ini adalah apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

3. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

3.1 Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan (*Empowerment*) berasal dari kata “*power*” yang berarti kemampuan, tenaga, atau kekuasaan. Empowerment adalah suatu peningkatan kemampuan yang sesungguhnya potensinya ada dan

usahanya adalah dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya (Sedarmayanti, 2009: 23).

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya (Sadu Wasistiono, 2009: 46)

Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial seseorang untuk meningkatkan kemandirian dan keswadaanyaannya untuk menuju kondisi hidup yang lebih baik dalam rangka meingkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang termuat dalam UUD 1945.

Menurut Korten (1988:69) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material melalui redistribusi modal. Sedangkan Kieffer (1984:112) menyimpulkan dari penelitiannya bahwa pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan :

- a. Perkembangan konsep diri yang lebih positif.
- b. Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis.

- c. Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.

Pemberdayaan adalah sebuah proses yang tidak dapat diukur secara matematis, apalagi dengan sebuah pembatasan waktu dan dana. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilihat dengan adanya kesadaran komunitas, diharapkan dapat mengubah pemberdayaan yang bersifat penguasaan menjadi bentuk kemitraan serta mengelimir terbentuknya solidaritas komunal semu pada masyarakat. Kebijakan pemberdayaan terhadap masyarakat dibutuhkan bukan semata karena alasan kebutuhan jangka pendek, namun lebih jauh dari itu, pemberdayaan dilakukan untuk strategi kemandirian sosial ekonomi masyarakat jangka panjang. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan adalah bagaimana memilih strategi yang tepat untuk pemberdayaan (Suparjan & Hempri Suyatno, 2003).

Menurut Suharto (2006 : 98), pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharaan,

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat pedesaan) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. *Pertama*, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah **obyek** penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai **subyek** (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri.

Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002). Sedangkan pemberdayaan masyarakat menurut Suhartini adalah usaha untuk

membangun, menguatkan, dan mengembangkan kelembagaan serta dilakukan pendampingan secara berkelanjutan menuju ke arah kemandirian (Suhartini,dkk. 2005).

Dalam Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat pada Pasal 1 ayat 8, dinyatakan bahwa “Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa”. Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

3.2 Usaha Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain (Sutoro Eko, 2002).

Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Sutoro Eko, 2002). Ketika kemitraan mampu mendorong

percepatan kemapanan ekonomi masyarakat, berfungsi secara efektif pemerintahan desa (sistem politik lokal), keteladanan pemimpin (elit lokal), dan partisipasi aktif masyarakat (lihat Kutut Suwondo, 2005), maka kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan dapat terwujud.

Muara yang ingin dicapai oleh sebuah pemberdayaan menurut Sulistiyani (2003) adalah sebuah komunitas mampu melakukan identifikasi, meraih peluang, adanya skala prioritas yang tepat, kesesuaian cara dan alat mencapai sasaran serta mampu bekerjasama dalam mencapai tujuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka sebuah program pemberdayaan yang disusun seharusnya mampu mengarahkan masyarakat untuk dapat meningkatkan kapasitas diri dan kelompok. Adapun arah dari keberdayaan yang dimaksud sebagai kapasitas adalah kesadaran dan perilaku, terjadinya transformasi informasi dan kemampuan serta peningkatan kemampuan intelektual, keterampilan sehingga mampu membentuk kemandirian (Sulistiyani, 2003).

Dalam melakukan usaha pemberdayaan masyarakat diperlukan prinsip-prinsip pemberdayaan supaya proses pemberdayaan berjalan dengan baik. Menurut Sri Najiyati (2005 : 54-60), prinsip-prinsip yang digunakan dalam melakukan usaha pemberdayaan kepada masyarakat adalah :

1) Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara

masyarakat dengan lembaga yang memerlukan program-program pemberdayaan.

2) Partisipatif

Dalam praktek, pemerintahan dan praktisi pemberdayaan belum bersedia sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan merumuskan kebutuhan. Mereka terjebak dalam keinginan untuk melihat keberhasilan pemberdayaan secara fisik. Dibutuhkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak agar pemberdayaan dapat terwujud.

3) Keswadayaan

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan orang lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subyek yang mempunyai kemampuan serba sedikit (*the have little*).

4) Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan peran masyarakat itu sendiri. Tetapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

F. Definisi Konseptual

1. Evaluasi

Evaluasi adalah proses penilaian secara obyektif atas hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dengan membandingkan antara realisasi input, output dan hasil tersebut guna mengukur tujuan maupun target yang telah dicapai untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan/program yang meliputi analisis faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan/program sehingga pada akhirnya bisa dilakukan revisi atau perbaikan-perbaikan yang lebih sempurna terhadap kebijakan/program tersebut di masa mendatang.

2. Evaluasi Program

Evaluasi Program adalah suatu kegiatan untuk mengukur sejauh mana tujuan/sasaran program yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga dapat diketahui seberapa besar manfaat atau kegunaan dari program tersebut.

3. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Masyarakat (dalam hal ini masyarakat pedesaan) adalah suatu upaya yang digunakan dalam pembangunan masyarakat pedesaan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat tersebut sehingga dapat melakukan pendayagunaan terhadap potensi-potensi sumberdaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan indikator-indikator yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang

akan diteliti. Indikator yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian untuk mengukur Evaluasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Di Kabupaten Sleman adalah :

1. Indikator-indikator untuk menilai evaluasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Di Kabupaten Sleman yakni :

1) Efektivitas

- a) Hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan program yang akan dicapai.
- b) Manfaat dari program untuk masyarakat.

2) Efisiensi

- a) Analisis biaya manfaat dari program untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- b) Pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3) Kecukupan

Capaian hasil program yang diinginkan dapat memecahkan masalah.

4) Pemerataan

Alokasi Biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok sasaran.

5) Responsivitas

Tanggapan atas hasil dari program apakah memberikan kepuasan kepada masyarakat sasaran.

6) Ketepatan

Hasil dari program benar-benar berguna atau bernilai bagi masyarakat sasaran.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program SL-PTT dalam usaha pemberdayaan masyarakat pedesaan di Desa Sumberagung dilihat dari aspek :

1) Kesetaraan

Adanya kedudukan yang sama antara kelompok sasaran dengan lembaga pelaksana program.

2) Partisipasi

Tingkat keaktifan antara kelompok sasaran dan pelaksana program.

3) Keswadayaan

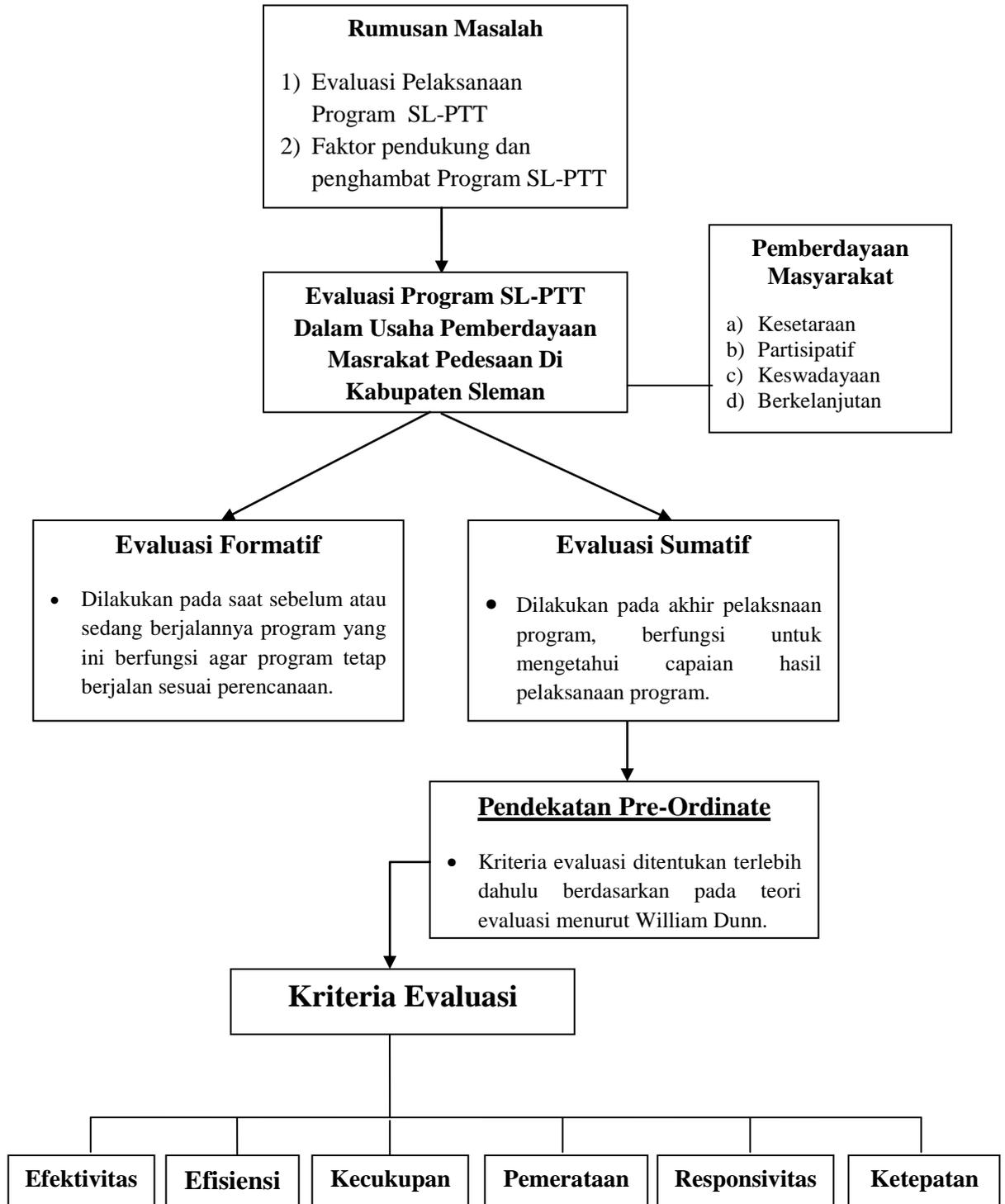
Mengedepankan kemampuan sumberdaya yang ada pada kelompok sasaran.

4) Berkelanjutan

Adanya keberlanjutan rencana dari program yang telah dilaksanakan kepada kelompok masyarakat sasaran.

H. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian



I. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi batasan penelitian adalah :

1. Masyarakat pedesaan yang diambil sebagai responden adalah pengurus kelompok tani dan beberapa anggotanya yang telah mengikuti Program SL-PTT dengan asumsi bahwa pengurus kelompok tani tersebut faham dengan program yang telah dilaksanakan.
2. Penelitian dilakukan terhadap pelaksanaan program SL-PTT Padi pada tahun 2013 di Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan.

J. Metode Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban tentang evaluasi program SL-PTT di Kabupaten Sleman sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat pedesaan, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.

Selain itu penelitian kualitatif dimaksud sebagai penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan (angka) lainnya. Dipilihnya penelitian kualitatif karena metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks, detail dan lengkap tentang fenomena-fenomena sosial yang ditemukan di lapangan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara

sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi (Saifuddin Azwar, 1998:7).

Sedangkan yang dimaksud dengan kualitatif deskriptif adalah suatu analisis data telaah masuk, untuk kemudian diadakan pengelolaan data tersebut sehingga akan tersusun dalam bentuk pengurutan, gambaran, dan mengklarifikasikan terhadap masalah-masalah yang sedang diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Winarno Surachmad, 1982: 140).

Jadi penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi dalam sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Moh.Nazir, 1988: 63).

Dalam melakukan penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai fakta dan bagaimana sebenarnya evaluasi pelaksanaan Program SL-PTT di Desa Sumberagung, serta ditujukan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang

menjadi pendukung maupun penghambat dari Program SL-PTT ini di daerah tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sleman dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Sumberagung dikarenakan Program SL-PTT ini dilaksanakan di wilayah tersebut serta masih banyak masyarakat petani yang kehidupannya berada dalam kondisi pra-sejahtera. Dipilihnya lokasi ini karena penulis ingin mengetahui evaluasi pelaksanaan Program SL-PTT di wilayah tersebut, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program dalam kerangka usaha memberdayakan masyarakat pedesaan di Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman.

3. Unit Analisis

Unit analisis adalah tempat dimana penulis mengumpulkan data-data dan informasi yang mana data-data dan informasi tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kabupaten Sleman, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Moyudan dan Kelompok Tani yang pernah mengikuti Program SL-PTT pada tahun 2013 di Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman.

4. Jenis Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber berupa keterangan atau informasi yang terkait

dengan fokus penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki kompetensi untuk memberikan data dan informasi terkait fokus penelitian. Adapun data-data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5. Data Primer Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Gambaran umum pelaksanaan Program SL-PTT	Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kabupaten Sleman BPP Kecamatan Moyudan	Wawancara,
Capaian hasil (realisasi) dari pelaksanaan Program SL-PTT di Sumberagung	BPP Kecamatan Moyudan	Wawancara, Dokumentasi
Sumberdaya yang digunakan untuk pelaksanaan Program SL-PTT	Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kabupaten Sleman BPP Kecamatan Moyudan	Wawancara, Dokumentasi
Tingkat ketercapaian hasil program dalam penyelesaian permasalahan pedesaan	Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kabupaten Sleman BPP Kecamatan Moyudan	Wawancara, Dokumentasi
Alokasi pemerataan penggunaan dana dan distribusi manfaat program pada kelompok sasaran	BPP Kecamatan Moyudan Kelompok Tani Desa Sumberagung	Wawancara Dokumentasi
Tanggapan dari kelompok sasaran terkait pelaksanaan Program SL-PTT	BPP Kecamatan Moyudan Kelompok Tani Desa Sumberagung	Wawancara, Dokumentasi
Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan Program SL-PTT	Kelompok Tani Desa Sumberagung	Wawancara
Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program SL-PTT	Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kabupaten Sleman BPP Kecamatan Moyudan	Wawancara

2. Data Sekunder

Adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data pendukung yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data ini dikumpulkan dengan mencatat/mengutip dari buku-buku, artikel, internet, penelitian terdahulu, mencatat dari instansi terkait dan dokumen-dokumen tahunan yang diperoleh dari tempat penelitian. Adapun data-data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6. Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data
Profil Kabupaten Sleman	BPS Kabupaten Sleman
Monografi Kecamatan Moyudan	Kantor Kecamatan Moyudan
Monografi Desa Sumberagung	Kantor Kelurahan Sumberagung
Data kelembagaan Kelompok Tani Desa Sumberagung	Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Moyudan
Hasil produksi padi dari pelaksanaan Program SL-PTT Desa Sumberagung	Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Moyudan
Landasan kebijakan Program SL-PTT	Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kabupaten Sleman

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diperoleh melalui wawancara/tanya jawab.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal penelitian, kutipan hasil penelitian, data statistik, media masa/elektronik, internet maupun hasil penelitian terdahulu yang berwujud dalam laporan penelitian, tesis maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah pengambilan data secara langsung dengan tanya jawab dan bantuan kuisioner. Wawancara akan dilakukan dengan narasumber yang memiliki kapasitas dan kapabilitas agar bisa memberikan informasi penting dan valid terhadap data yang menjadi objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam baik dilakukan dalam keadaan formal maupun informal yang dilakukan terhadap subjek penelitian (Swardi Endrasara, 2006).

Bentuk percakapan formal menggunakan lembaran-lembaran yang sudah berisi garis pokok, topik atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan. Wawancara secara informal mengandung unsur spontanitas, kesantiaian dan tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Kemudian untuk narasumber yang akan dijadikan informan dalam wawancara ini adalah :

- 1) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kabupaten Sleman (dibantu dengan Kabid yang menangani Program SL-PTT) dengan alasan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab operasional terhadap pelaksanaan program SL-PTT di Kabupaten Sleman.
- 2) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Tingkat Kecamatan Moyudan dengan alasan yang mengetahui data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Program SL-PTT yang ada di Desa Sumberagung.
- 3) Pengurus dan anggota Kelompok Tani Desa Sumberagung yang telah mengikuti Program SL-PTT dengan alasan karena yang telah mengetahui secara langsung dan merasakan manfaat dari adanya Program SL-PTT ini.

Tabel 1.7. Objek Wawancara

Objek	Informan	Target Data
Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kabupaten Sleman	1 orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan kebijakan Program SL-PTT. 2. Indikator keberhasilan Program SL-PTT. 3. Efektivitas, dan Efisiensi Program SL-PTT.
Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Moyudan	1 orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pelaksanaan Program SL-PTT Desa Sumberagung 2. Distribusi dan Penggunaan Dana Program SL-PTT Desa Sumberagung. 3. Tingkat keberhasilan Program SL-PTT. 4. Ketepatan pelaksanaan Program PEMP.
Total	2 orang	

Untuk menentukan jumlah responden pada kelompok tani yang dijadikan objek wawancara penulis menggunakan teknik *Cluster Random Sampling*. Pengambilan sampel dengan cara klaster adalah melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek secara individual. Keuntungan dari teknik ini adalah segi efisiensi kerja yang menyangkut waktu dan biaya. Apalagi mengingat bahwa dalam pengambilan sampel cara klaster, membuat daftar klaster-klaster yang

lengkap adalah jauh lebih mudah daripada membuat daftar individu dalam seluruh populasi (Saifuddin Azwar, 1998: 87-88).

Populasi dibagi dulu atas kelompok berdasarkan area atau *cluster*. Anggota subpopulasi tiap *cluster* tidak perlu homogen. Beberapa *cluster* dipilih dulu sebagai sampel. Kemudian dipilih lagi anggota unit dari sampel *cluster* diatas. Dalam memilih anggota unit ini, bisa saja diambil seluruh elementari unit dari *cluster* atau sebagian dari unit elementer dari *cluster* tersebut. Biasanya randomisasi penarikan sampel hanya dikala memilih *cluster*, dan tidak di kala memilih anggota unit elementer (Moh.Nazir, 1988: 332).

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pedesaan di Desa Sumberagung yang tergabung ke dalam kelompok tani sasaran Program SL-PTT tahun 2013 dengan jumlah 1.094 orang. Populasi tersebut terbagi ke dalam 17 Kelompok Tani sasaran Program SL-PTT tahun 2013. Kemudian dari 17 kelompok sasaran ini (*cluster*) diambil 8 kelompok sebagai sampel *cluster* dengan sub-populasi 602 orang. Pengambilan sampel *cluster* berdasarkan pada 4 kring (area pertanian) yang ada di Sumberagung.

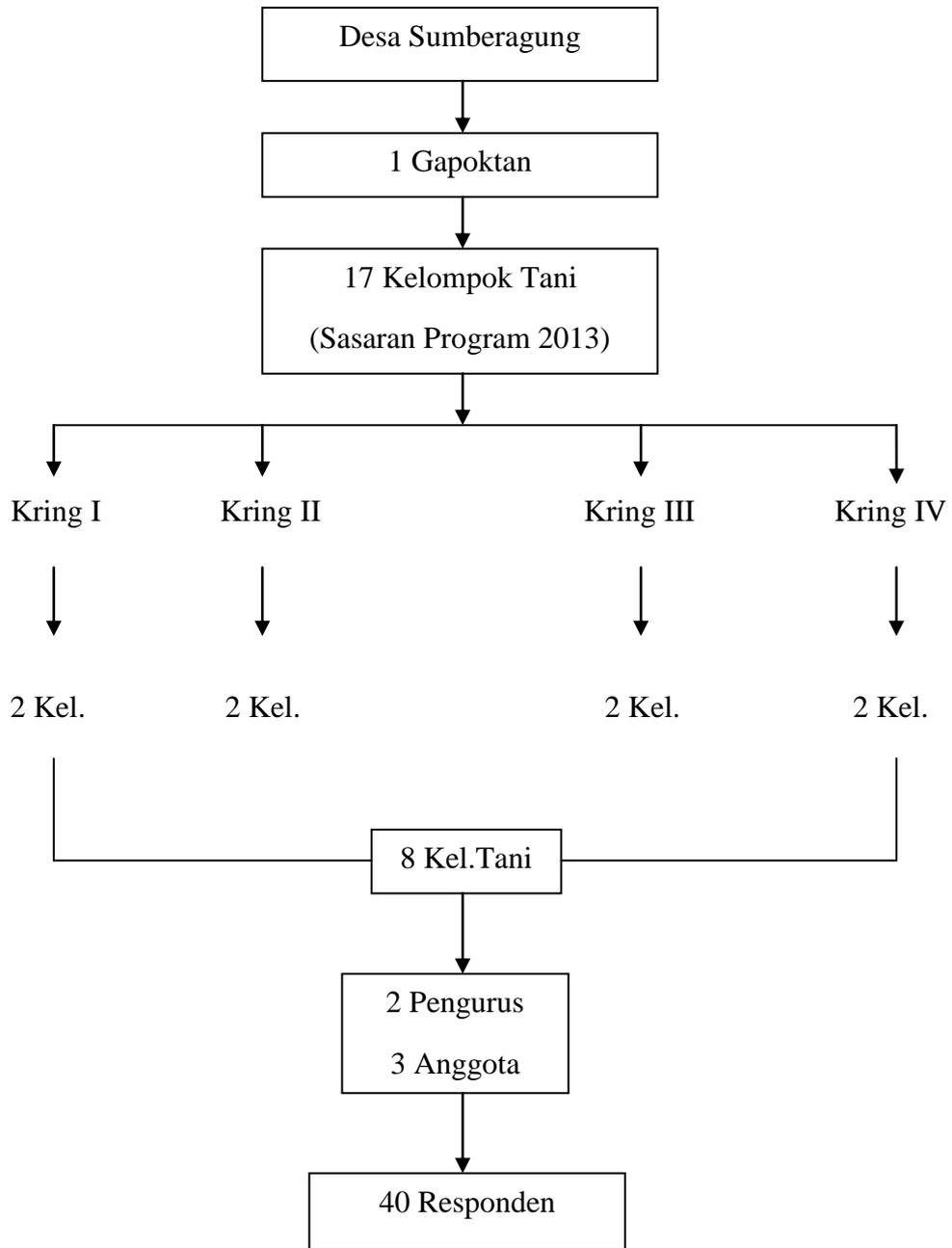
Selanjutnya dari sampel *cluster* yang telah ditentukan (8 kelompok) dipilih lagi anggota unit. Dalam memilih anggota unit ini tidak diambil seluruh elementari unit dari *cluster*, tetapi hanya sebagian dari unit elementer dari *cluster* tersebut. Pemilihan anggota unit sampel *cluster* untuk dijadikan informan wawancara yakni dari pengurus kelompok 2

orang dan anggota kelompok 3 orang yang telah mengikuti pelaksanaan program sehingga jumlah anggota unit tiap sampel *cluster* adalah 5 orang. Jadi jumlah keseluruhan dari unit anggota sampel *cluster* yang dijadikan sebagai sampel informan wawancara pada kelompok tani sasaran adalah sebanyak 40 orang.

Tabel 1.8. Responden Pada Kelompok Tani Sasaran

Sampel Cluster	Unit Anggota Sample Cluster	Target Data
Kelompok Tani di Desa Sumberagung yang menjadi sasaran Program SL-PTT tahun 2013: <ul style="list-style-type: none"> • 8 Kelompok Tani 	- 2 orang pengurus tiap kelompok (16 orang). - 3 orang anggota tiap kelompok (24 orang)	1. Manfaat yang sudah dirasakan anggota kelompok dengan adanya SL-PTT. 2. Tanggapan dari anggota mengenai Program SL-PTT. 3. Faktor pendukung dan penghambat Program SL-PTT.
Total Responden	40 orang	

Gambar 1.2. Bagan Pengambilan Responden Penelitian Pada Kelompok Tani



2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih jelas. Observasi akan dilakukan di Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi pertanian di Sumberagung, jumlah kelompok Tani yang ada di wilayah tersebut, mencari informasi mengenai kondisi dan kelompok tani yang pernah mengikuti Program SL-PTT serta untuk menentukan data-data yang terkait dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengutip data atau dokumen-dokumen yang sudah ada di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, Kantor Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Moyudan, Kantor Kecamatan maupun Kelurahan serta lembaga yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi ini berupa arsip/dokumen, tulisan catatan, tabel, maupun profil tempat lokasi penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif deskriptif. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono menjelaskan langkah analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Adapun tahap-tahap teknik analisis data yang digunakan meliputi (Sugiyono, 2007) :

a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mengubah data kasar yang diperoleh dari lapangan. Data kasar yang dimaksud disini adalah keterangan-keterangan atau informasi yang diuraikan informan tetapi tidak relevan dengan fokus masalah penelitian sehingga perlu direduksi.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Hasil reduksi data kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dibaca atau dipahami. Untuk lebih menjelaskan uraian maka dapat dibuat gambaran berupa diagram interaktif tentang fenomena yang terjadi.

c) Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini, akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder yang berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi/catatan lapangan. Hasil data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data tersebut, kemudian penulis susun menjadi laporan yang sistematis. Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk deskriptif yang didukung dengan teori yang bersumber dari buku. Selanjutnya dianalisa untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan Program SL-PTT dalam usaha pemberdayaan masyarakat

pedesaan di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan. Tahapan terakhir yakni menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

K. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penelitian terbagi ke dalam empat bab yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, definisi operasional, kerangka berpikir, batasan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari lokasi penelitian yang meliputi profil Kabupaten Sleman, Profil Kecamatan Moyudan dan Profil Desa Sumberagung. Selain itu juga berisi penjelasan umum dari Program SL-PTT.

BAB III : ANALISIS EVALUASI PROGRAM SL-PTT DALAM USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan hasil penelitian mengenai gambaran umum pelaksanaan Program SL-PTT Desa Sumberagung tahun 2013, Dasar pemilihan kelompok tani sasaran yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, Deskripsi responden, Hasil evaluasi pelaksanaan Program SL-PTT dilihat

dari aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program dalam usaha pemberdayaan masyarakat.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang akan penulis kemukakan dalam skripsi ini.